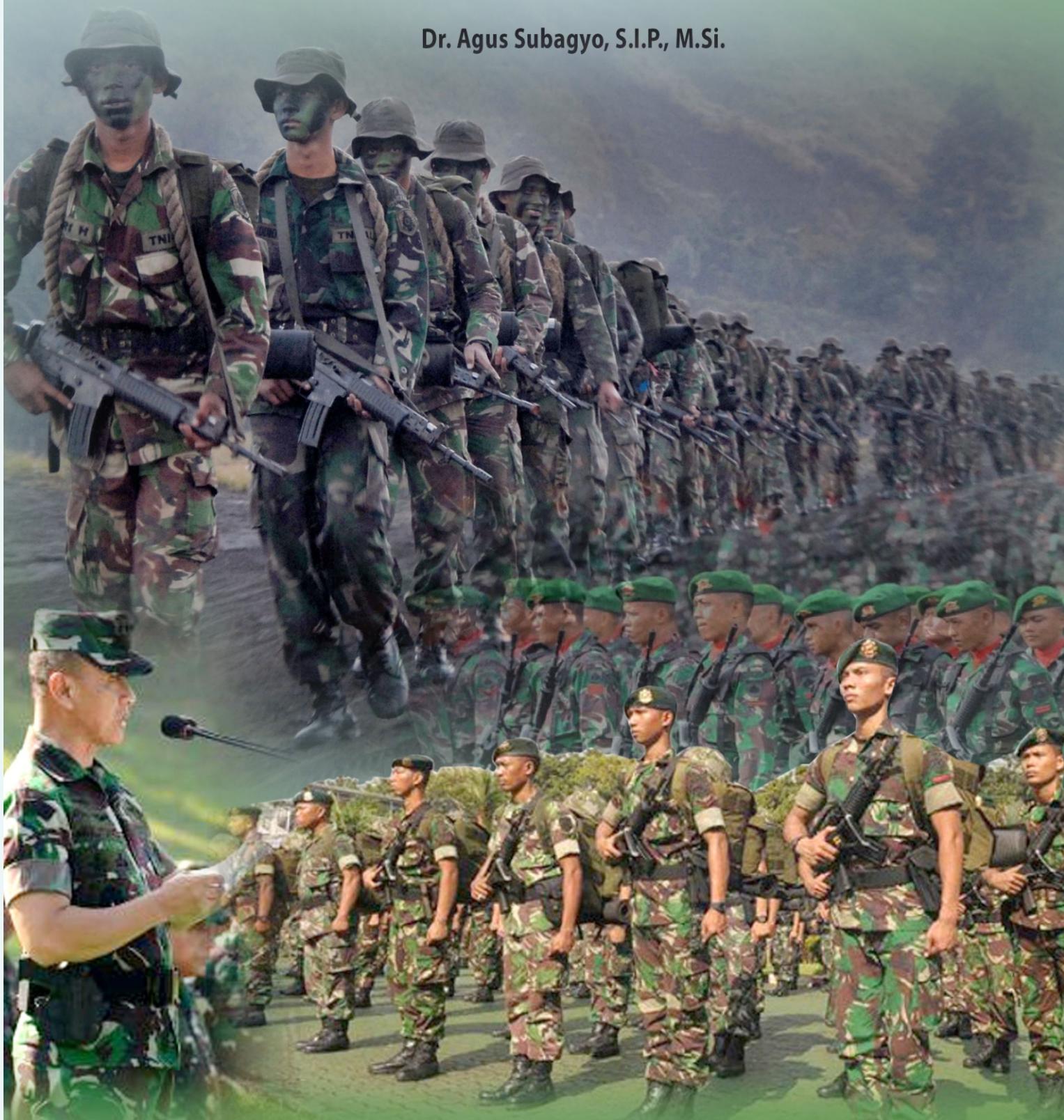


# MEWUJUDKAN PROFESIONALISME TNI AD DI ERA REFORMASI

Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si.



## ABSTRAK

Tulisan ini ingin menguraikan tentang perkembangan profesionalisme TNI AD di era reformasi. Profesionalisme TNI AD dipahami dari TNI AD yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, dipenuhi kesejahteraannya, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan tunduk pada kebijakan politik negara. Setelah reformasi mencapai 19 tahun, dapat dikatakan bahwa profesionalisme TNI AD telah terwujud. Namun, terdapat beberapa kendala seperti alokasi anggaran pertahanan yang terbatas, tarikan kepentingan politik sipil, dan konflik elit politik sipil.

**Kata kunci :** Profesionalisme, TNI, sipil, militer.

## ABSTRACT

*This paper wants to describe the development of army professionalism in the reform era. Army professionalism is understood from army that is trained, well-educated, well equipped, full of prosperity, not practicing politics, not doing business, and is subject to the country's political policies. After the reforms reached 19 years, it can be said that army professionalism has materialized. However, there are constraints such as limited defense budget allocations, the pull of civilian political interests, and civilian political elite conflict.*

**Keyword:** Professionalism, army, civil, military.

## Pendahuluan

Arus reformasi tahun 1998 merupakan titik tolak dimulainya reformasi TNI dari militer yang pretorian menuju militer yang profesional. Momentum adanya reformasi dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberian, penataan, dan perbaikan internal TNI. Melalui program “reformasi internal TNI”, TNI melakukan serangkaian perubahan struktural, kultural, dan instrumental yang mengarah pada terwujudnya TNI yang profesional. TNI menyadari bahwa perubahan zaman, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan terhadap penyesuaian organisasi mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam tubuh TNI.

Banyak sekali perubahan yang telah terjadi dalam tubuh TNI pasca reformasi yang patut di apresiasi oleh semua pihak<sup>1</sup>. Paling tidak terdapat perubahan struktural, kultural, dan instrumental yang dilakukan oleh TNI di era reformasi. Pertama, perubahan struktural, dimana ditandai dengan pemisahan antara TNI dengan Polri (yang dulunya tergabung dalam ABRI), keluarnya TNI dari DPR/MPR (dihapuskannya fraksi ABRI/Fraksi TNI-Polri), dihapuskannya kekaryaan TNI, dan struktur organisasi yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua, perubahan kultural, dimana TNI tunduk patuh taat terhadap supremasi sipil, TNI tidak berpolitik praktis, TNI tidak berbisnis, dan TNI tunduk pada nilai-nilai HAM dan demokrasi. Perubahan intsrumental ditandai dengan diterbitkannya UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Said S, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006, hal. 45

Perubahan internal TNI yang mengarah pada militer yang profesional ini sebenarnya patut disyukuri dan diapresiasi tinggi, dimana kekuatan TNI bersedia untuk kembali ke barak dan meninggalkan panggung politik praktis serta menyerahkan penyelenggaraan kekuasaan politik pada pemerintahan sipil. Padahal, transisi menuju demokrasi di era reformasi di beberapa negara, seperti di Amerika Latin, Eropa Timur dan Asia Selatan relatif tidak mulus dan sulit mencapai demokrasi yang terkonsolidasi karena adanya “keenggan” militer untuk kembali ke barak.

Di Indonesia, TNI dengan sadar diri dan sepenuh hati, mengikuti amanat reformasi dan secara tulus ikhlas melepaskan berbagai atribut kekuasaan yang pernah disandang selama kurang lebih 32 tahun pada masa Orde Baru. Hal ini sungguh memberikan peluang bagi terwujudnya transisi menuju demokrasi yang mulus dan terkonsolidasi secara baik. Dengan suka rela, TNI melepaskan diri dari kekuasaan politik, kembali ke barak, dan fokus pada alat pertahanan negara semata. Padahal, TNI di masa Orde Baru adalah kekuatan militer yang sangat kuat dan powerfull, melalui prinsip “Dwi Fungsi ABRI”.

Saat ini, konsep dwi fungsi ABRI telah dihapuskan dan TNI hanya memfokuskan diri pada fungsi pertahanan negara semata. Dwi fungsi ABRI adalah dua fungsi yang dimiliki oleh ABRI kala itu, dimana ABRI memerankan fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara, juga menjalankan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sekarang ini, TNI tinggal memiliki satu kekuatan saja, yakni pertahanan negara, sedangkan sebagai

<sup>2</sup> Agus Subagyo, *Implementasi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI*, Disertasi, Yogyakarta : UGM, 2013, hal. 2-5.

kekuatan keamanan sudah diambil oleh Polri. Sebagai kekuatan sosial politik, sekarang ini, TNI tidak memiliki kekuatan sosial politik, karena TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

Berbagai perubahan internal yang dilakukan oleh TNI di era reformasi menunjukkan bahwa terdapat komitmen yang kuat dalam kalangan TNI untuk berubah, menyesuaikan perkembangan zaman, memenuhi tuntutan masyarakat, dan mengadaptasi perkembangan lingkungan strategis<sup>3</sup>. TNI menyadari bahwa doktrin militer universal adalah sebagai alat pertahanan negara sehingga setiap program dan kegiatan TNI saat ini selalu diabdikan untuk menciptakan kekuatan militer yang profesional. Terwujudnya militer yang profesional tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI semata, melainkan menjadi perhatian, beban dan tanggungjawab semua pihak, semua golongan, dan semua komponen bangsa.

Pemerintah sebagai kekuatan yang menentukan dalam terwujudnya TNI yang profesional harus memberikan perhatian yang besar terhadap TNI. Dukungan kebijakan, dukungan anggaran, dan dukungan teknis lainnya harus terus diberikan oleh pemerintah terhadap masa depan profesionalisme TNI. TNI sudah lapang dada untuk menanggalkan kekuasaan politiknya selama 32 tahun, sehingga sudah menjadi tugas negara/pemerintah untuk memberikan "kompensasi" yang layak bagi TNI, berupa pemenuhan kebutuhan yang diperlukan bagi keberlangsungan reformasi TNI yang profesional, paling tidak memenuhi kekuatan esensial minimum (*minimum essential force/MEF*).

Masyarakat, khususnya komponen civil society, yang tergabung dalam Ormas, LSM, kalangan mahasiswa, pers dan berbagai pilar kekuatan demokrasi lainnya harus memberikan ruang yang luas kepada TNI untuk melakukan perbaikan, penataan, dan pembenahan diri. Jangan sampai selalu menuduh TNI secara membabi buta dan jangan sampai selalu berprasangka negatif terhadap apa yang dilakukan oleh TNI dalam mereformasi diri menuju militer yang profesional. Kekuatan sipil harus memberikan kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap TNI dalam melakukan langkah dan upaya menuju pada TNI yang profesional sesuai dengan supremasi sipil, HAM, dan demokrasi.

Dalam kaitan inilah, TNI yang profesional merupakan sebuah solusi bagi Indonesia untuk membangun Indonesia yang aman, maju dan sejahtera. Indonesia akan sulit maju, demokratis, dan berkembang, jika militernya masih belum profesional. Hal ini sesuai dengan adagium yang mengatakan bahwa "semakin pretorian militer di suatu negara, maka semakin sulit untuk menciptakan negara yang demokratis". Demikian pula sebaliknya, "semakin profesional militer di suatu negara, maka semakin mudah untuk menciptakan negara yang demokratis". TNI memiliki peran yang sangat besar dalam terciptanya negara yang demokratis. Artinya, jika kita ingin menjadikan negara Indonesia demokratis, maka salah satu yang harus dilakukan adalah TNI harus profesional.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintahan di era reformasi, sejak zaman BJ Habibie, Abdurachman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), selalu berkomitmen untuk mewujudkan TNI yang profesional.

<sup>3</sup> Arman Suhantoyo, *Reformasi Militer Indonesia*, Bandung :Alfabeta, 2004, hal. 35

Profesionalisme TNI merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan sejarah yang harus didukung oleh semua komponen bangsa, agar supaya tercipta tatanan politik yang demokratis. Profesionalisme TNI dapat tercipta dengan baik apabila hubungan sipil militer di Indonesia berjalan dengan transparan, akuntabel, dan demokratis, saling percaya dan saling mengisi, tanpa adanya hegemoni dan superioritas.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah, upaya dan kiat-kiat untuk mewujudkan TNI yang profesional. Namun demikian, diperlukan parameter dan alat ukur untuk menilai profesionalisme militer di Indonesia. Hal ini penting karena ukuran profesionalisme militer di Indonesia tentu berbeda dengan ukuran profesionalisme militer di negara lain, mengingat situasi, kondisi, dan sejarah militer yang berbeda-beda antar negara, termasuk kondisi sosial politik dan sosial ekonomi dari masing-masing negara yang beragam. Tulisan ini akan menguraikan perkembangan profesionalisme TNI AD sejak awal reformasi sampai dengan saat ini melalui parameter TNI yang profesional berdasarkan UU TNI, khususnya Bab II pasal 2, yang dengan tegas menyebutkan bahwa : “**Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi**”.

### Pembahasan.

#### 1. Profesionalisme TNI AD : Definisi & Makna.

Sebelum membahas definisi profesionalisme TNI AD, maka perlu

diuraikan terlebih dahulu pengertian militer yang profesional secara universal dari ahli militer terkemuka dunia, sebagai berikut :

Menurut Amos Perlmutter, terdapat tiga jenis tipe militer, yakni militer yang profesional, militer yang pretorian, dan militer yang revolusioner. Militer yang profesional dipahami sebagai militer yang memegang teguh fungsi pertahanan negara, tunduk pada negara / pemerintah, taat pada komandan, mempunyai semangat / jiwa korsa yang tinggi, serta memegang teguh nilai-nilai/etika militer. Tipe militer yang profesional dinilai sebagai tipe militer yang mampu bersinergi dengan tatanan politik yang demokratis<sup>4</sup>.

Menurut Samuel P Huntington, militer yang profesional adalah militer yang memiliki 3 syarat/kategori, yakni militer harus memiliki keahlian, tanggungjawab, dan spirit corps. Artinya, militer harus memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu-ilmu kemiliternya dan ilmu peperangan untuk melindungi negara dari ancaman. Militer harus pula memiliki tanggungjawab untuk mengamanahkan semua proses penyelenggaraan negara berdasarkan pada supremasi sipil, HAM dan demokrasi. Militer juga harus memiliki jiwa korsa, pemahaman tentang kepangkatan, hirarki, dan jabatan agar supaya satu komando dan satu perintah. Dalam konteks ini, Huntington ingin menyatakan bahwa militer yang profesional adalah militer yang netral dalam politik, berada di atas semua kepentingan politik, dan komitmen terhadap fungsi pertahanan negara<sup>5</sup>.

Menurut Fattah, militer yang profesional adalah militer yang memiliki ciri sebagai berikut : tentara yang ahli dan mahir dalam memerankan fungsi pertahanan negara,

<sup>4</sup> Amos Perlmutter, *Militer Dan Politik*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000, hal. 27 - 29.

tentara yang bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam konstelasi politik praktis, tentara yang memiliki disiplin, taat terhadap hukum, dan memiliki jiwa korsa yang tinggi, memiliki moral dan etika kepajuritan yang tinggi, berupaya membela kepentingan rakyat, menghormati kekuasaan pemerintahan yang sah, serta penghormatan terhadap supremasi sipil<sup>5</sup>.

Setelah melihat definsi profesionalisme militer dari ketiga ahli militer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa militer memiliki keunikan dibandingkan dengan kekuatan negara lainnya. Militer memiliki senjata, hirarkis, satu komando, berseragam, ahli, terampil, memiliki kompetensi khusus, dan tunduk pada supremasi sipil, HAM, dan demokrasi. Militer yang profesional didambakan oleh semua negara karena terwujudnya tatanan politik yang demokratis sangat ditentukan oleh corak militernya yang profesional.

Dalam konteks ini, apabila kita melihat profesionalisme militer di Indonesia, sebenarnya negara/pemerintah telah menggariskan definisi, ukuran, dan parameter TNI yang profesional. Hal ini tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya di Bab II, pasal 2, butir d, yang dinyatakan secara tegas bahwa tentara yang profesional adalah : **“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.**

<sup>5</sup> Samuel P Huntington, *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*, Jakarta : Grasindo, 2003, hal. 102 – 103.

<sup>6</sup> Fattah, *Demilitarisasi Tentara*, Yogyakarta : Lkis, 2005, hal. 247

Oleh karena itu, untuk mengukur profesionalisme militer di Indonesia pada era reformasi saat ini seyogyanya berpegang teguh pada definisi yang tertuang dalam UU TNI tersebut, sehingga akan dapat digambarkan sejauhmana upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan profesionalisme TNI AD.

## 2. Mengukur Profesionalisme TNI AD.

Profesionalisme TNI AD telah dilakukan secara nyata, empiris, dan komprehensif semenjak terjadinya reformasi 21 Mei 1998, dimana terdapat suasana kebathinan dari semua kalangan dan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menciptakan TNI AD yang profesional dalam mendukung tatanan politik yang demokratis.

Apabila dilihat sampai dengan saat ini, upaya mewujudkan profesionalisme TNI AD di era reformasi sudah lebih dari 19 tahun, sehingga sudah layak untuk dianalisis dan diukur sudah sejauhmana perkembangan reformasi TNI AD. Alat ukur untuk mengukur perkembangan profesionalisme TNI AD adalah dari definisi yang tertuang dalam UU TNI, yang akan dijabarkan dalam indikator yang realistik, praktis, dan sederhana.

Berikut ini akan diuraikan perkembangan profesionalisme TNI AD yang dilihat dari definisi profesionalisme TNI menurut UU TNI, antara lain :

- **TNI AD yang terlatih.** TNI AD selalu melakukan latihan yang dilakukan secara rutin, baik latihan antar matra maupun intra matra, bahkan latihan dengan militer negara lain, untuk mengasah kemahiran dan keterampilan dalam pertempuran maupun peperangan. Latihan yang dilakukan oleh TNI AD dilakukan di satuan masing-masing, baik latihan dasar, latihan khusus maupun latihan

gabungan (Lat gab) yang melibatkan tiga matra sekaligus.

TNI AD menyadari bahwa latihan, baik yang diselenggarakan di ruang simulasi maupun di lapangan, baik geladi posko maupun geladi medan atau geladi lapangan adalah sebuah keharusan bagi setiap prajurit. Tidak ada pelaksanaan tugas yang berhasil tanpa adanya latihan. Oleh karena itu, apabila dilihat dari SOP atau Protap yang ada di dalam TNI AD, terdapat banyak sekali buku petunjuk (Bujuk) maupun Juklak, Juknis dan Jukmin tentang pembinaan latihan, baik yang ada di Mabes TNI, Mabes Angkatan, maupun di berbagai satuan kewilayahan, satuan teritorial, satuan khusus, maupun di lembaga pendidikan TNI AD.

- **TNI AD yang terdidik.** Apabila dilihat sampai dengan saat ini, sudah banyak para perwira TNI AD yang memiliki pendidikan yang mumpuni, baik pendidikan luar negeri maupun pendidikan dalam negeri. Para perwira TNI telah dididik sejak di taruna baik di Akmil, AAL maupun AAU, kemudian melanjutkan pendidikan lanjutan perwira (Diklapa), Sesko angkatan dan Sesko TNI. Bahkan ada pula yang melaksanakan pendidikan sampai dengan Lemhanas.

Ada pula yang menempuh pendidikan umum, baik strata S1, S2 maupun S3. Di lingkungan TNI AD saat ini, telah banyak perwira TNI AD yang bergelar sarjana, master, maupun Doktor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ditambah lagi dengan adanya pendirian Universitas Pertahanan (Unhan) yang digagas dan bernaung di bawah Kementerian

Pertahanan sebagai sarana untuk menimba ilmu-ilmu pertahanan, kemiliteran dan perang. Artinya, para perwira TNI AD di era reformasi sudah sangat sadar tentang pentingnya mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

- **TNI AD yang diperlengkapi.** Ditinjau dari aspek peralatan, TNI AD memang masih jauh dari kata sempurna dan lengkap berkaitan dengan sarana prasarana, persenjataan, Alutsista dan peralatan khusus (Alsus) lainnya. Namun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, TNI AD selalu melakukan modernisasi militer, khususnya modernisasi peralatan tempur, peralatan perang dan Alutsista, yang dapat mendukung profesionalisme militer TNI AD.

Hal ini tidak terlepas dari dukungan anggaran pemerintah yang selalu berupaya memprioritaskan pembelian Alutsista TNI AD di tengah kondisi ekonomi Indonesia mengalami krisis. Perhatian pemerintah terhadap peralatan tempur TNI AD menunjukkan bahwa TNI AD semakin diperhatikan oleh negara melalui peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan militer yang canggih. TNI AD menyadari bahwa di era globalisasi saat ini, tidak cukup dengan postur tentara yang kuat secara fisik semata, melainkan memerlukan dukungan peralatan teknologi komunikasi dan informasi yang canggih.

- **TNI AD tidak berpolitik praktis.** Komitmen TNI AD untuk tidak berpolitik telah ditunjukkan dengan penghapusan dwi fungsi ABRI, dihapuskannya doktrin kekaryaan TNI, TNI keluar dari DPR/

MPR, dan kembali ke barak serta tidak mau ikut campur dan terlibat dalam politik praktis. Bahkan, untuk membuktikan bahwa TNI tidak berpolitik praktis, sampai-sampai TNI berkomitmen untuk tidak memiliki hak pilih dalam setiap Pemilu, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Apabila ada anggota TNI AD yang ingin terlibat dalam politik praktis, maka harus meninggalkan atribut militernya alias pensiun dari dinas militer. TNI AD berkomitmen untuk memegang peran sebagai kekuatan pertahanan negara dan berupaya untuk menjauhi dunia politik praktis, sebagai bentuk reformasi militer TNI yang profesional. TNI AD menghormati domain sipil yang hidup dalam dunia politik. Politik TNI AD adalah politik negara, politik yang berbasis pada konstitusi negara, kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

- **TNI AD tidak berbisnis.** Berkaitan dengan bisnis TNI, sudah nampak jelas bahwa TNI AD di era reformasi telah menunjukkan janjinya untuk tidak berbisnis. Hal ini dapat dilihat dari adanya penataan bisnis TNI yang telah berhasil dilakukan sehingga sampai dengan saat ini tidak ada lagi bisnis TNI yang struktur, massif dan sistematis. Yayasan dan koperasi dipergunakan oleh TNI AD untuk mencukupi kebutuhan para anggota/prajuritnya sendiri. Tidak ada lagi bisnis TNI AD yang mengatasnamakan institusi TNI AD secara formal.

Semua bisnis TNI AD di era reformasi telah dikembalikan atau diambil alih oleh negara. Negara mengelola dan mengendalikan semua pelimpahan aset bisnis TNI AD pada masa lalu sehingga tidak ada lagi sekarang ini bisnis TNI AD yang dikelola

oleh satuan-satuan TNI AD di pusat maupun di daerah. Artinya, sekarang ini, TNI AD telah memfokuskan diri pada peran pertahanan negara, dan tidak ada lagi cameo “bisnis sampingan” TNI AD di luar pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

- **TNI AD yang Dijamin kesejahteraannya.** Terkait dengan kesejahteraan prajurit di era reformasi, memang masih memprihatinkan. Masih ada ketimpangan antara prajurit tamtama dan bintara dengan prajurit perwira. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan mencolok antara kesejahteraan antara TNI AD dengan Polri yang kadangkala memicu ketegangan dan keributan antara satuan “kakak beradik” ini. Realitasnya, di tengah masyarakat, terdapat tampilan bahwa anggota Polri lebih berkecukupan dibandingkan dengan prajurit TNI AD, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuhan sosial.

Namun demikian, bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan prajurit. Negara telah memberikan kebijakan renumerasi dan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahterannya. Setiap tahun, pemerintah selalu meningkatkan alokasi anggaran pertahanan untuk alokasi kesejahteraan prajurit, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, maupun berbagai kebijakan renumerasi lainnya, agar supaya prajurit menjadi lebih profesional.

- **TNI AD yang mengikuti kebijakan politik negara.** Sampai dengan saat ini, TNI AD sangat patuh, loyal, dan taat terhadap kebijakan politik negara. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, siapapun panglima

tertingginya, TNI AD selalu mengikuti kebijakan politik negara. kekuasaan politik yang diselenggarakan oleh kekuatan sipil yang menghasilkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis selalu didukung oleh TNI AD. Artinya loyalitas, ketaatan, dan kepatuhan TNI AD tidak mengenal sipil maupun militer dari latar belakang pemimpinnya.

Hal ini terbukti dari banyaknya pemerintahan yang presidennya berasal dari kalangan sipil dan TNI selalu memberikan dukungan dan pengamanan. Mulai dari BJ Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY dan Jokowi, selalu mendapatkan pengakuan, dukungan dan pengamanan dari TNI. Hanya ada satu presiden yang berlatar belakang jenderal, yakni SBY, dan ada empat presiden yang berasal dari sipil murni di era reformasi, yang kesemuanya didukung dan diamankan oleh TNI. Hal ini menunjukkan bahwa TNI AD telah menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

**3. Kendala dalam Mewujudkan Profesionalisme TNI AD.** Keberhasilan mewujudkan profesionalisme TNI AD di era reformasi tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari semua komponen bangsa. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan profesionalisme TNI AD, antara lain, sebagai berikut:

- **Alokasi Anggaran Pertahanan.** Alokasi anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh Pemerintahan Jokowi

pada tahun 2017 ini kurang lebih Rp. 108 Trilyun. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mengingat dari zaman dahulu sampai dengan saat ini, baru kali ini, alokasi anggaran pertahanan dalam APBN mencapai jumlah 3 digit. Hal ini patut disyukuri dan diberi apresiasi karena akan bermanfaat bagi TNI untuk mencukupi kebutuhan rutin, kebutuhan operasional dan kebutuhan belanja barang/pengadaan peralatan perang/Alutsista.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, khususnya apabila dilihat dari prosentase terhadap GDP dan dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh TNI saat ini, maka alokasi anggaran pertahanan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa 70% anggaran pertahanan sudah habis tersedot untuk kebutuhan rutin dan kebutuhan operasional, sedangkan hanya 30% yang dipergunakan untuk pengadaan Alutsista. Padahal, pengadaan Alutsista TNI membutuhkan biaya yang mahal, besar dan banyak mengingat teknologi yang canggih dari peralatan Alutsista tersebut.

Hal ini memang menjadi dilema dari pemerintahan saat ini, dimana di satu sisi, pemerintah dituntut oleh masyarakat untuk menekankan pada prioritas kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan infrastruktur dalam APBN. Di sisi lain, untuk kepentingan pertahanan, diperlukan anggaran pertahanan yang besar untuk menjamin stabilitas,

keamanan nasional, dan TNI yang profesional. Diperlukan manajemen alokasi anggaran yang tepat untuk menata dan menyeimbangkan antara anggaran pertahanan (*security*) dengan anggaran kesejahteraan (*prosperity*). Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam mewujudkan TNI AD yang profesional di era reformasi.

- **Tarikan dari kekuatan sipil.** Dalam perpolitikan di era reformasi saat ini, masih ada kekuatan politik sipil yang mencoba-coba untuk menarik-narik TNI ke dalam kancah politik praktis. Elit politik sipil yang ada di dalam partai politik berupaya untuk menarik anggota TNI untuk terjun dalam politik dan menjadi daya tarik dalam persaingan politik praktis, baik dalam Pilkades, Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Upaya menarik anggota TNI yang sudah pensiun sebenarnya sah-sah saja, namun yang menjadi masalah adalah ketika kekuatan politik tertentu menarik anggota TNI aktif untuk memihak salah satu pihak dalam konstelasi politik.

Kekuatan TNI memang sampai dengan saat ini masih menjadi daya tarik bagi kalangan sipil. Kekuatan TNI di tengah masyarakat masih menjadi sosok panutan dan teladan bagi masyarakat. Masyarakat masih menjadikan TNI sebagai *role model* yang selalu menarik, diperhatikan dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pengaruh informal TNI di tengah masyarakat masih sangat terasa dan besar sehingga hal ini menjadi modal sosial bagi TNI untuk terus menjadi kekuatan yang menarik di mata siapapun.

Dalam proses politik praktis yang membutuhkan mobilisasi suara, penggerahan massa dan perebutan pengaruh di mata masyarakat, maka keberadaan anggota TNI di tengah masyarakat menjadi daya tarik bagi kekuatan politik untuk menarik dalam politik praktis. Kekuatan sipil berupaya dan berlomba-lomba untuk menarik kekuatan TNI agar supaya masuk dalam kelompoknya atau kekuatan politiknya, yang tentunya hal ini sangat membahayakan bagi perkembangan profesionalisme TNI, khususnya TNI AD.

- **Konflik politik antar elit politik sipil.** Salah satu realitas dalam dunia politik sipil adalah adanya persaingan politik, kompetisi untuk merebut kekuasaan dan konstelasi politik antar elit politik yang kadang kala sangat membahayakan keutuhan NKRI. Konflik politik antar elit politik di era reformasi bisa “memancing” TNI, khususnya TNI AD, untuk masuk dalam ranah politik atas nama keutuhan NKRI dan persatuan serta kesatuan bangsa, karena sipil dianggap gagal dalam menciptakan stabilitas politik dan stabilitas keamanan.

Komitmen TNI untuk kembali ke barak, tidak mau berpolitik praktis dan menyediakan ruang yang bebas bagi politisi sipil untuk bermain dalam ranah politik adalah sebuah niatan luhur bagi berlangsungnya tatanan politik yang demokratis. Ada anggapan dari kalangan TNI bahwa domain sipil adalah domain politik praktis dan domain militer adalah domain di pertahanan negara. Namun, apabila sipil tidak mampu bermain politik secara baik, beretika, dan cantik, maka ada ketidakrelaan dari

kalangan TNI untuk masuk ke dalam politik.

TNI akan masuk kembali dalam politik apabila politik yang dimainkan oleh sipil telah menabrak haluan negara, melanggar ideologi Pancasila, dan mengancam keutuhan NKRI serta keselamatan bangsa. Sudah menjadi tantangan bagi kalangan sipil untuk menciptakan politik yang stabil berbasis pada empat pilar kebangsaan. Namun, kenyataan selama ini menunjukkan, bahwa politik praktis di Indonesia berpotensi mengancam kebhinekaan, keberagaman, dan cenderung mengancam keutuhan NKRI.

Bahkan, marak belakangan ini gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme, maupun berbagai ormas dan LSM radikal yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama, membentuk negara khilafah, maupun mengingkari adanya keberagaman dan kebhinekaan, sehingga hal ini dapat mendorong TNI untuk masuk dalam politik, yang berujung pada kurangnya profesionalisme TNI, khususnya TNI AD, sebagai akibat dari ketidakberesan sipil dalam mengelola negara dan pemerintahan.

## Kesimpulan

Era reformasi telah melahirkan peluang bagi TNI, khususnya TNI AD untuk mewujudkan profesionalisme sebagai

prasyarat bagi terciptanya tatanan politik yang demokratis. Tatanan politik yang demokratis yang didesain oleh pemerintah tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak dilakukan penataan, perbaikan, dan pembenahan terhadap institusi TNI AD. Profesionalisme TNI AD merupakan prasyarat bagi keberlangsungan negara dan pemerintahan yang demokratis.

Sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa militer Indonesia telah berhasil melakukan penataan, perbaikan, dan pembenahan, yang mengarah pada terwujudnya TNI AD yang profesional. TNI AD telah dikatakan mengarah pada profesional apabila dilihat dari kondisi saat ini, dimana TNI AD telah terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik, tidak berbisnis, terpenuhi kesejahteraannya, dan tunduk terhadap kebijakan politik negara yang berdasarkan pada HAM, demokrasi, dan supremasi sipil.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi oleh TNI AD dalam mewujudkan profesionalismenya, yakni kendala alokasi anggaran pertahanan yang masih jauh dari kebutuhan riel, tarikan kekuatan politik praktis yang berupaya meraup keuntungan dari posisi politik TNI yang berpengaruh di tengah masyarakat, dan konflik elit politik dalam Pilkada, Pilpres, dan Pileg yang dapat membahayakan keselamatan negara dan mengancam keutuhan NKRI, yang tentunya mempengaruhi profesionalisme TNI AD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chrisnandi, Yudi, *Kesaksian Para Jenderal: Sekitar Reformasi Internal dan Profesionalisme TNI*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006).
- Desch, Michael C., *Politisi VS Jenderal : Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002).
- Diamond, Larry dan Plattner, Marc F., *Hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000).
- Effendy, Muhamdir, *Profesionalisme Militer : Profesionalisme TNI*, (Malang : UMM Press, 2008).
- Fattah, *Demilitarisasi Tentara*, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Huntington, Samuel P, *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*, Jakarta : Grasindo, 2003.
- Kadi, Saurip, *TNI Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, (Jakarta : Pusat Studi Masalah-Masalah Militer dan Grafiti Press, 2000).
- Perlmutter, Amos, *Militer Dan Politik*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Said S, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Subagyo, Agus, *Implementasi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI*, Disertasi, Yogyakarta : UGM, 2013.
- Suhantoyo, Arman, *Reformasi Militer Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2004.
- Sujito, Arie & Eko, Sutoro (ed.), *Demilitarisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, (Yogyakarta : IRE Press, 2002).



Dr. Agus Subagyo, S.I.P., M.Si. lahir di Sukoharjo, 18 April 1978. Pria yang aktif sebagai Dosen dan menulis sejumlah buku seperti buku Bela Negara; Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi ini, memperoleh gelar Sarjana (S.I.P.) dalam Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000, kemudian meraih Gelar Magister (M.Si.) Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, dan meraih Gelar Doktor Ilmu Politik (Dr.) dari FISIPOL UGM pada tahun 2013. Alumnus Universitas Gajah Mada tersebut pernah mengajar di sejumlah tempat seperti di FISIP Universitas Langlang Buana (2007–2009); Dosen Non Organik di Sesko TNI (2004–2007); Dosen Non Organik di Pusdikintel Polri (2008 – 2010); Dosen Non Organik di Seskoad (2003– Sekarang); Unhan Jakarta (2011-Sekarang) dan Pascasarjana FISIP Unswagati Cirebon (2015).